

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERDIDIK KABUPATEN/KOTA DI BALI

Faga Arta Urtalina¹
I Ketut Sudibia²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: fagaarta31@gmail.com

ABSTRAK

Pengangguran di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali cenderung cenderung lebih banyak berasal dari tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA Umum/Kejuruan, Diploma, dan Sarjana dibandingkan dengan tingkat pendidikan SMP dan SD. Hal ini disebabkan kurang selarasnya antara perencanaan pendidikan dan juga lapangan pekerjaan yang tersedia serta semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja akan semakin tinggi pula aspirasinya untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara serempak maupun parsial upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan proporsi penduduk usia kerja terhadap pengangguran terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil pengujian, secara simultan upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan proporsi penduduk usia kerja secara serempak berpengaruh terhadap pengangguran terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Secara parsial upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan dan proporsi penduduk usia kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi, proporsi penduduk usia kerja, dan pengangguran terdidik

ABSTRACT

Unemployment in the Bali province tends mostly come from the workforce with senior high school level both general or vocational, and Bachelor degree compared with the level of junior and elementary education. This is due to the lack of synchronization between educational planning as well as available employment from the higher level of education owned by the workforce will be higher also aspirasinya to get a more appropriate position or employment opportunities. The purpose of this study was to investigate the effect both simultaneously and partially the minimum wage, economic growth, investment, and the proportion of working age population to uneducated unemployed regency or city in Bali province. This study uses multiple linear regression analysis and using secondary data. Based on the test results, simultaneously minimum wage, economic growth, investment, and proportion of working age population simultaneously affect the educated unemployed regency or city in Bali Province. Partially the minimum wage, economic growth, and investment have a negative and significant effect and the proportion of the working age population has a positive and significant impact on the unemployed educated regency or city in Bali province.

Keywords: *minimum wage, economic growth, investment, the proportion of working age population, and educated unemployment*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tentu tidak pernah lepas dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang disuatu negara (Oka Artana Yasa dan Sudarsana, 2015). Tujuan pembangunan ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Aspek penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara yaitu sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, jika disuatu negara kualitas sumber daya manusia semakin meningkat maka cenderung lebih cepat pula keberhasilan pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Negara seperti Indonesia seharusnya diuntungkan dalam mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi karena memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup besar. Namun kenyataannya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak selalu dijamin oleh besarnya sumber daya manusia, bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan itu sendiri (Sulistiawati, 2012). Hal itu dapat terjadi apabila jumlah sumber daya manusia yang dimiliki tidak diimbangi dengan kualitas yang cukup baik. Akibatnya, akan menimbulkan masalah seperti masalah pengangguran.

Masalah ketenagakerjaan seperti pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang kompleks yang hampir dihadapi oleh setiap negara berkembang dan bahkan juga negara maju (Murialti, 2016). Pengangguran adalah kondisi tidak memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan atau proporsi orang-orang yang dapat bekerja dan mencari pekerjaan secara aktif namun mereka tidak dapat

menemukannya (Bakare, 2011). Salah satu yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran adalah kurangnya selarasnya antara pertumbuhan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia (Ningsih, 2015). Selain itu menurut Seran (2017) penyebab timbulnya pengangguran disebabkan oleh empat faktor diantaranya: (1) tingkat upah yang rendah, (2) ketidakcocokan antara kemampuan pekerja yang diminta dengan kemampuan pekerja yang ada, (3) faktor tempat tinggal, akses pekerja di kota lebih besar dibandingkan di desa terhadap informasi lapangan kerja, (4) kurangnya permintaan efektif, yang berpotensi menimbulkan pengangguran karena cenderung mengurangi keuntungan perusahaan.

Pengangguran dapat menyebabkan rantai efek terhadap ekonomi negara seperti tidak terkumpulnya pajak dan kenaikan biaya pengeluaran pemerintah (Sakiene, 2011). Selain itu, menurut Knabe and Ratzel (2011) pengangguran dapat mempengaruhi kesejahteraan individu, terutama secara tidak langsung karena individu menggunakan informasi tentang seberapa sering mereka menganggur di masa lalu sebagai indikator keberhasilan pasar kerja di masa mendatang. Jika seseorang lebih sering menganggur di masa lalu, dia juga cenderung menganggur di masa depan, penurunan kepuasan hidup berkorelasi dengan tingkat pengangguran di masa lalu, sebagian besar disebabkan oleh ketakutan akan pengangguran di masa depan.

Pengangguran di negara sedang berkembang seperti Indonesia lebih banyak terjadi pada kaum muda dan mereka yang berpendidikan atau sering disebut pengangguran terdidik (Arndt and Sundrum, 2012). Tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA ke atas (sebagai

kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut (BPS, 2013). Pengangguran ini sering terjadi pada tenaga kerja yang berasal dari keluarga mampu atau kaya. Ini terjadi karena mereka cenderung rela tidak bekerja (menganggur) dan mendapat pendapatan dari pemberian orang tua daripada harus bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka inginkan, serta mereka lebih selektif dalam mencari pekerjaan seperti jabatan yang tinggi, tempat atau fasilitas yang nyaman dan gaji yang besar (Putri, 2015).

Masalah pengangguran terdidik seperti ini seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius oleh pemerintah sebab berdampak pada merosotnya daya beli masyarakat, serta menurunnya produktivitas masyarakat. Pengangguran dapat juga mempengaruhi kondisi sosial dan politik seperti meningkatnya kejahatan dan gangguan terhadap stabilitas politik negara (Azeng and Thierry, 2015). Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terdidik, antara lain: (1) ketimpangan antara kesempatan kerja dan persediaan tenaga kerja, (2) pola pikir masyarakat yang berorientasi pada teori *human capital* (Mariska, 2016).

Jumlah tenaga kerja terdidik cenderung meningkat lebih cepat daripada jumlah lowongan pekerjaan yang baru (Keyfitz, 2006). Kondisi ini tentu akan menambah tinggi tingkat pengangguran terdidik yang ada. Menurut Mahmood *et al* (2014) tingginya tingkat pengangguran terdidik memberikan citra yang jelek terhadap pendidikan, karena sistem pendidikan dinilai kurang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pendidikan yang seharusnya menjadi kunci untuk memberdayakan angkatan kerja dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk

mengurangi tingkat pengangguran justru menjadi salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya pengangguran terdidik (Ewubare and Ogbuagu, 2017). Hal ini disebabkan oleh lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan justru sebaliknya menjadi lulusan sebagai pencari kerja.

Dalam kondisi seperti ini, lulusan yang menganggur dapat menimbulkan masalah serius bagi negara karena hal itu mencerminkan pemborosan sumber daya manusia dan menyiratkan kembalinya investasi besar yang dikeluarkan oleh pemerintah pada pendidikan tinggi (Lim, 2011). Di samping itu, tingkat pengangguran terdidik yang tinggi ini berarti bahwa sumber tenaga kerja terdidik tidak digunakan secara efisien. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk memaksimalkan output dari pendidikan untuk mengatasi masalah tersebut (Meidani, 2011).

Pendidikan merupakan faktor yang dianggap menjadi kunci sukses dalam menciptakan tenaga kerja terampil dan bermutu tinggi. Tenaga kerja yang terampil dan bermutu tinggi yang nantinya diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ekonomi ke depannya (Cahyani, 2014). Hal ini akan tercapai apabila didukung dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga nantinya dapat menyerap semua tenaga kerja terdidik yang ada. Ketidaksinambungan antara output yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan pelatihan dengan lapangan pekerjaan akan menyebabkan terjadinya pengangguran terdidik (Meteb, 2017).

Pengangguran terdidik menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia. Pengangguran terdidik tiap tahunnya justru mengalami peningkatan. Menurut

(Sakernas) tahun 2016 jumlah pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan di Indonesia mencapai 7,031,775 jiwa. Fenomena unik terjadi pada pengangguran dengan tingkat pendidikan SD dan SMP yang jumlahnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan SMA Umum/Kejuruan, Diploma, dan Universitas.

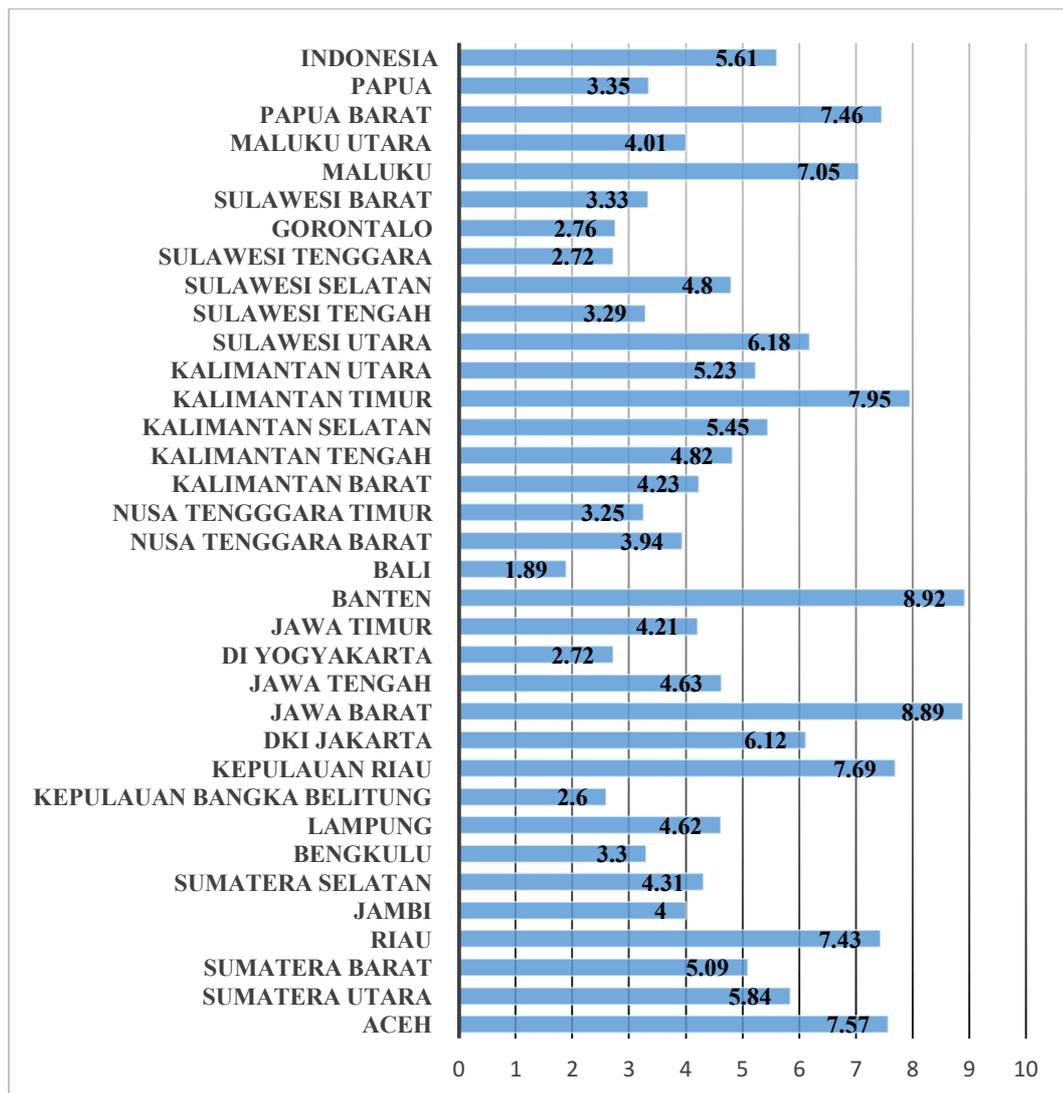
Tabel 1
Pengangguran Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan, Indonesia 2011-2016 (jiwa)

Pendidikan yang ditamatkan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
< SD	2.361.681	2.312.191	1.918.139	1.694.100	1.432.057	1.479.146
SMP	2.138.864	1.714.776	1.689.643	1.566.838	1.373.919	1.294.483
SMA Umum	2.376.254	1.867.755	1.925.660	1.962.786	2.280.029	1.950.626
SMA Kejuruan	1.161.362	1.067.009	1.258.201	1.332.521	1.569.690	1.520.549
Diploma I,II,III	276.816	200.028	185.103	193.517	251.541	219.736
Sarjana S1,S2,S3	543.216	445.836	434.185	495.143	653.586	567.235
Jumlah	8.681.392	7.344.866	7.410.931	7.244.905	7.560.822	7.031.775

Sumber: Sakernas Agustus 2011-2016

Tabel 1 memperlihatkan data pengangguran terbuka tahun 2011-2016 di Indonesia. Pada tingkat pendidikan SD dan SMP jumlah pengangguran dari tahun 2011-2016 mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan jumlah pengangguran untuk tingkat pendidikan SMA Umum/Kejuruan, Diploma dan Universitas yang secara keseluruhan mengalami peningkatan. Tahun 2011 jumlah pengangguran

untuk tingkat pendidikan SMA ke atas berjumlah 4,180,847 jiwa, mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 3,317,899 jiwa. Namun, dari tahun 2012 hingga 2015 jumlahnya terus mengalami peningkatan hingga mencapai 4,754,846 jiwa. Tahun 2016 jumlah penganggurannya turun menjadi 4,258,146 jiwa.



Gambar 1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 2016

Sumber: Sakernas Agustus 2011-2016

Gambar 1 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,61 persen. Provinsi Banten berada pada urutan tertinggi

dibandingkan dengan Provinsi yang lainnya dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,92 persen. Provinsi Bali berada pada urutan terendah dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,89 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tenaga kerja di Provinsi Bali jauh lebih terserap jika dibandingkan dengan Provinsi yang lainnya. Namun, dengan tingkat pengangguran terbuka yang terendah Bali masih memiliki masalah lain mengenai pengangguran, dimana jumlah penganggur di Provinsi Bali cenderung lebih besar dari tingkat pendidikan SMA ke atas jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah.

Tabel 2
Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan, Bali 2011-2016 (persen)

Pendidikan yang ditamatkan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
< SD	1,48	0,99	0,46	0,56	0,83	0,30
SMP	3,14	1,83	1,31	1,78	0,79	0,65
SMA Umum	4,12	2,74	2,88	2,29	2,87	2,17
SMA Kejuruan	4,27	4,04	3,25	4,51	3,62	3,96
Diploma I/II/III	6,55	3,23	3,40	3,26	5,25	4,44
Sarjana S1/S2/S3	5,21	2,92	2,45	2,71	3,05	4,35
Jumlah	2,95	2,10	1,83	1,90	1,99	1,89

Sumber: Sakernas Agustus 2011-2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan SD dan SMP tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan mengalami penurunan. Berbeda dengan tingkat pendidikan SMA Umum/Kejuruan, Diploma, dan Universitas yang secara keseluruhan dari tahun 2011-2016 cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2011 - 2013 mengalami penurunan dari 20,15 persen menjadi 11,98 persen namun pada tahun 2013 - 2016 cenderung mengalami peningkatan sebesar

2,94 persen dari 11,98 persen menjadi 14,92 persen. Dengan demikian, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD dan SMP dapat terserap dengan lancar jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan SMA Umum/Kejuruan, Diploma dan Universitas.

Pengangguran lulusan SMA ke atas memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengangguran lulusan SMP dan SD. Hal ini tentu menjadi masalah karena lulusan SMA ke atas memiliki kemampuan yang lebih jika dibandingkan dengan lulusan SMP ke bawah, sehingga mereka lebih siap untuk memasuki pasar kerja. Namun, dalam kenyataannya justru lulusan SMA ke atas menciptakan pengangguran yang lebih tinggi jika dibandingkan lulusan SMP ke bawah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tenaga kerja dengan jenjang pendidikan SLTA Umum/Kejuruan, Diploma, dan Universitas tergolong tenaga kerja terdidik yang banyak menganggur jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan SD dan SLTP.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah untuk pengangguran lulusan SMA Kejuruan dan Diploma yang memiliki angka lebih tinggi jika dibandingkan dengan lulusan SMA Umum dan Sarjana. Hal ini seharusnya tidak demikian karena lulusan SMA Kejuruan dan Diploma memiliki ketrampilan khusus yang lebih di bidangnya daripada lulusan SMA Umum dan Sarjana. Namun, dalam kenyataannya justru lulusan SMA Kejuruan dan Diploma menciptakan pengangguran yang lebih besar. Oleh sebab itu, ini menjadi masalah serius bagi lembaga pendidikan yang dinilai gagal dalam menciptakan tenaga kerja terampil

yang seharusnya mampu membuat lapangan pekerjaan justru menjadi penyumbang terbesar pengangguran terdidik di Bali.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terdidik adalah upah minimum. Apabila tingkat upah minimum yang ditetapkan semakin tinggi, maka kondisi ini berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang akan berakibat pada tingginya pengangguran (Solihin, 2014). Suryahadi *et al* (2010) mengatakan bahwa dalam pasar kerja yang kompetitif, ketika upah minimum ditetapkan diatas tingkat upah pasar equilibrium akan menyebabkan pengurangan lapangan pekerjaan dan menciptakan pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali upah minimum Provinsi Bali dari tahun ke tahun mengalami peningkatan khususnya untuk tahun 2014 – 2016. Pada tahun 2014 upah minimum Provinsi Bali mencapai Rp. 1.542.600, tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.621.172, dan tahun 2016 naik lagi menjadi menjadi Rp. 1.807.600.

Pengangguran terdidik juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Mankiw (2000:340) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif terhadap pengangguran yang dijelaskan melalui hukum Okun. Hukum Okun menjelaskan bahwa pengangguran dengan output memiliki pengaruh yang empiris. Output yang dihasilkan bergantung pada jumlah pekerja yang digunakan. Semakin besar jumlah pekerja yang digunakan maka output yang dihasilkan cenderung besar, sehingga kondisi ini cenderung dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Suartha dan Murjana (2017)

mengatakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tinggi aktivitas ekonomi akan bergairah dan cenderung merangsang tumbuhnya investasi, akibatnya peluang pembukaan lapangan pekerjaan yang baru akan semakin besar. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2014 - 2016, pertumbuhan ekonomi Bali secara keseluruhan sangat bervariasi. Tahun 2014 pertumbuhannya mencapai 6,73 persen, tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 6,04 persen, kembali mengalami peningkatan tahun 2016 menjadi 6,24 persen.

Sukirno (2010:256) mengatakan bahwa investasi memiliki hubungan dengan pengangguran berdasarkan teori pembangunan Harrod Domar. Teori Harrod Domar memandang pembentukan modal (investasi) merupakan sebuah pengeluaran yang akan meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Dimana apabila pembentukan sejumlah modal dilakukan pada masa sekarang, maka kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar pada masa berikutnya. Investasi mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran terdidik dari sisi penawaran. Semakin besar investasi maka peluang jumlah pekerja yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa akan meningkat, sehingga peluang pembukaan lapangan pekerjaan akan semakin besar. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Investasi Bali Pada tahun 2014 mencapai Rp. 3.846.438.000.000, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi Rp. 19.007.670.000.000, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi Rp. 12.057.640.000.000.

Selain dipengaruhi oleh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan investasi, pengangguran terdidik juga dipengaruhi oleh proporsi penduduk usia kerja. Ryan *et al* (2017) mengatakan bahwa ketika proporsi penduduk usia kerja meningkat dan

tidak diimbangi dengan kualitas dan lapangan kerja yang baru, maka akan meningkatkan persaingan dalam mencari pekerjaan sehingga akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Kondisi ini sesuai dengan teori kependudukan Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat jika dibandingkan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian, sehingga menimbulkan persaingan dalam mendapatkan bahan makanan (pekerjaan). Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tiap tahun proporsi penduduk usia kerja mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 75,14 persen, tahun 2014 meningkat mencapai 75,34 persen, dan tahun 2015 meningkat mencapai 75,64 persen.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu. 1) Apakah upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi dan proporsi penduduk usia kerja secara serempak berpengaruh pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali? 2) Bagaimana pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi dan proporsi penduduk usia kerja secara parsial terhadap tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali?

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, adapun tujuan penelitian yaitu. 1) Untuk menganalisis secara simultan pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi dan proporsi penduduk usia kerja terhadap tingkat pengangguran terdidik Kabupaten/Kota di Bali. 2) Untuk menganalisis secara parsial pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi dan proporsi penduduk usia kerja terhadap tingkat pengangguran terdidik Kabupaten/Kota di Bali.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi tentang pengangguran terdidik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran kepada semua pihak yang berkepentingan seperti mahasiswa, masyarakat umum, dan pemerintah pusat maupun daerah. Kontribusi pemikiran kepada pemerintah berkaitan dengan menentukan dan melaksanakan program-program pengentasan pengangguran khususnya pengangguran terdidik.

Berdasarkan latar belakang, rumusan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu.

- 1) Upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi dan proporsi penduduk usia kerja secara simultan berpengaruh signifikan pada tingkat pengangguran terdidik di Bali.
- 2) Upah minimum secara parsial berpengaruh positif pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali.
- 3) Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali.
- 4) Investasi secara parsial berpengaruh negatif pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali.
- 5) Proporsi penduduk usia kerja secara parsial berpengaruh positif pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat asosiatif dan metode kualitatif. Kabupaten/kota di Bali merupakan tempat dipilihnya penelitian ini. Alasannya, meskipun memiliki tingkat pengangguran terbuka terendah di Indonesia. Bali justru memiliki masalah yang timbul dari struktur pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikannya, yang dimana khususnya tingkat pendidikan SMA Umum/Kejuruan, Diploma, dan Universitas yang cenderung mengalami peningkatan daripada tingkat pendidikan SMP dan SD setiap tahunnya.

Penelitian ini terdiri dari 4 independent variable yaitu Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Proporsi Penduduk Usia Kerja. Dependent variable pada penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terdidik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika Provinsi Bali atau yang disebut juga dengan data sekunder. Adapun data yang dipakai, yaitu: data tingkat pengangguran terdidik, data upah minimum, data pertumbuhan ekonomi, data investasi, data proporsi penduduk usia kerja.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hal yang perlu diperhatikan dalam memastikan model regresi yang digunakan apakah sudah layak atau tidaknya dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Persamaan yang dibuat dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = tingkat pengangguran terdidik
- X₁ = upah minimum
- X₂ = pertumbuhan ekonomi
- X₃ = investasi
- X₄ = proporsi penduduk usia kerja
- β₁ - β₄ = koefisien Regresi
- e = standar eror
- α = konstanta

Pengaruh variabel-variabel bebas (X) yaitu upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan proporsi penduduk usia kerja terhadap variabel terikat (Y) yaitu tingkat pengangguran terdidik diperoleh persamaan sebagai berikut.

Y	=	43,087	-	0,904LnX ₁	-	0,080X ₂	-	0,119LnX ₃	-	0,330X ₄ (2)
Se	=	(0,554)		(0,284)		(0,088)		(0,101)		
t	=	(-1,630)		(-0,280)		(-1,346)		(-3,275)		
Sig	=	(0,107)		(0,780)		(0,182)		(0,002)		
R ²	=	0,306		F=		9,386				

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menghasilkan model regresi yang baik dan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam memastikan model regresi yang digunakan baik atau tidak, uji yang pertama harus dilakukan adalah uji normalitas. Tujuan dilakukannya uji normalitas untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidak data yang dipakai. Pengujiannya membandingkan tingkat signifikansi dengan alpha yang digunakan yaitu (α = 0,05).

Apabila lebih besar dari alpha ($\alpha = 0,05$) maka data yang digunakan berdistribusi normal dan model layak digunakan.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas dengan Metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45392087
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.899
Asymp. Sig. (2-tailed)		.394

Sumber: *Data diolah, 2018*

Hasil uji dengan menggunakan Metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilainya sebesar 0.899, dimana signifikansi yaitu 0.394. Nilai ini lebih besar dari α (0.05), sehingga dapat dikatakan lolos dari uji normalitas karena datanya sudah terdistribusi normal serta model yang dipakai layak untuk digunakan untuk analisis lebih lanjut

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LnX1	.629	1.591
	X2	.619	1.615
	LnX3	.584	1.712
	X4	.801	1.248

Sumber: *Data Diolah, 2018*

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa empat variabel dalam model yang digunakan mempunyai nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas pada model regresi yang dipakai sehingga perlu dianalisis lebih lanjut

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glesjer

Model		Sig.
1	(Constant)	.915
	LnX1	.490
	X2	.512
	LnX3	.677
	X4	.579

Sumber; *Data diolah, 2018*

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glesjer*, tingkat signifikansi dari empat variabel yang dipakai pada model mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan pada absolut residual sehingga dinyatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas yang terjadi pada model yang dipakai.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.554 ^a	.306	.274	1.48774	1.884

Sumber: *Data diolah. 2018*

Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1.884. Nilai ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai tabel alpha 5 persen, jumlah sampel (n)

sebesar 90 dan jumlah variabel independen sebesar 4 ($k=4$), maka didapatkan nilai tabel Durbin Watson yaitu $dL= 1.565$, $du= 1.750$ dan $4-du= 2.250$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa $du < DW < (4-du)$ dengan nilai $1.750 < 1.884 < 2.250$ sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi bebas dari autokorelasi

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.306	.274	1.48774

Sumber: *Data diolah, 2018*

Nilai Koefisien Determinasi (R^2)= 0,306 berarti variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan proporsi penduduk usia kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Propinsi Bali sebesar 30,6persen dan sisanya 69,4persen dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar model.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y). Nilai signifikansi pada tabel hasil olahan SPSS digunakan untuk melihat pengaruh tiap variabel. Apabila nilai sig. F diatas 0.05 secara simultan upah minimum (X_1), pertumbuhan ekonomi (X_2), investasi (X_3), dan proporsi penduduk usia kerja (X_4) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Provonsi Bali.

Tabel 8
Hasil Uji (F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83,099	4	20,775	9,386	,000 ^b
	Residual	188,136	85	2,213		
	Total	271,234	89			

Sumber: *Data diolah. 2018*

Tabel 7 menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 9,386 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel upah minimum (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), investasi (X₃), dan proporsi penduduk usia kerja (X₄) secara simultan memiliki pengaruh signifikan pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual pada variabel terikat. Pengaruh variabel independen pada variabel dependen dapat dilihat dari besarnya nilai signifikansi tiap variabel dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap (konstan).

Tabel 9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	43,087	8,624		4,996	,000
	LnX1	-,904	,554	-,186	-1,630	,107
	X2	-,080	,284	-,032	-,280	,780
	LnX3	-,119	,088	-,159	-1,346	,182
	X4	-,330	,101	-,330	-3,275	,002

Sumber: *Data diola., 2018*

Hasil uji t memperlihatkan nilai signifikansi upah minimum lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dan berarah negatif dari upah minimum terhadap tingkat pengangguran terdidik Kabupaten/Kota di Bali. nilai koefisien X_1 sebesar -0,904 yang artinya jika diasumsikan terjadi kenaikan upah minimum 1 persen maka akan menurunkan tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar 0.90 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena pengangguran terdidik berbeda dengan pengangguran terbuka. Menurut Wannakrairoj (2013) terjadi kesenjangan upah antara pekerja terdidik dan pekerja tidak terdidik. pekerja terdidik cenderung lebih selektif dalam mencari pekerjaan, sehingga pekerja terdidik cenderung menginginkan tingkat upah yang lebih tinggi dari upah minimum, sehingga semakin tinggi upah atau gaji yang di tawarkan (lebih tinggi dari upah minimum) maka akan cenderung banyak tenaga kerja terdidik yang menawarkan dirinya untuk bekerja. Oleh karena itu, mengapa hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa upah minimum berpengaruh tidak signifikan dan memiliki arah negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Anggun (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan “upah berpengaruh negatif dan signifikan pada pengangguran terdidik di Sumatera Barat”.

Pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai sig. lebih besar dari 0,05, ini menandakan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Provinsi Bali. Nilai Koefisien X2 sebesar -0,080 memiliki arti bahwa jika diasumsikan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen maka akan menurunkan tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Provinsi Bali 0.08 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil tersebut sesuai dengan teori hukum okun dan hipotesis penelitian. Hukum Okun menjelaskan pengangguran memiliki pengaruh empiris dengan output dalam siklus bisnis. Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu aktivitas perekonomian. Dengan kata lain, semakin meningkat aktivitas perekonomian di suatu wilayah akan cenderung meningkatkan produktivitas suatu perusahaan dan akan cenderung membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja, sehingga nantinya diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran terdidik. Hasil ini didukung oleh pendapat Al-Habees dan Rumman (2012) yang mengatakan bahwa pertumbuhan dan pengangguran terdidik bergerak ke arah yang berlawanan, sehingga tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi maka akan menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Artinya ada pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Putri (2015) yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Tengah”. Hasil penelitian tersebut

menyebutkan “pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pengangguran terdidik di Jawa Tengah”.

Investasi memiliki signifikansi diatas 0,05 yang memiliki arti investasi mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Provinsi Bali. Nilai Koefisien X3 sebesar -0,119 memiliki arti bahwa apabila diasumsikan terjadi kenaikan investasi 1 persen maka akan menurunkan tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar 0.12 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian dan teori Harrod Domar. Teori Harrod Domar menyatakan bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dengan kata lain, investasi dapat meningkatkan permintaan efektif seluruh masyarakat dan meningkatkan kapasitas produksi. Kegiatan investasi sangat penting dilakukan karena investasi akan mampu membantu dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya kapasitas produksi ini akan cenderung membutuhkan jumlah pekerja yang banyak. Semakin banyak jumlah pekerja yang dibutuhkan maka output yang akan dihasilkan akan meningkat dan semakin besar peluang terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Dengan begitu, semakin meningkatnya lapangan pekerjaan yang ada diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Bali. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Prasaja (2013) yang berjudul “Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa

Tengah Periode Tahun 1980-2011”. Hasil penelitian tersebut menyebutkan “investasi asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah”.

Variabel proporsi penduduk usia kerja nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan proporsi penduduk usia kerja mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali. Nilai Koefisien X_4 sebesar -0,330 memiliki arti bahwa apabila diasumsikan terjadi peningkatan proporsi penduduk usia kerja 1 persen maka akan menurunkan tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar 0.33 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori kependudukan Malthus dan hipotesis penelitian. Kondisi ini dikarenakan penambahan proporsi penduduk usia kerja di Povinsi Bali ini diiringi dengan kualitas yang memadai. Hal ini dapat dilihat dengan nilai indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menandakan bahwa setiap penambahan penduduk usia kerja dengan kualitas yang meningkat akan menciptakan angkatan kerja yang lebih produktif sehingga nantinya dapat terserap dengan baik oleh lapangan kerja yang ada. Hasil ini didukung oleh pendapat Rizwan and Parvez (2010) mengatakan bahwa pengangguran anak muda di Pakistan jauh lebih tinggi 22% dibandingkan dengan pengangguran orang dewasa, hal ini dikarenakan pengangguran anak muda di Pakistan disebabkan oleh kurangnya pendidikan, ketrampilan, dan pengalaman. Oleh karena itu, setiap penambahan jumlah proporsi penduduk usia kerja yang diimbangi dengan kualitas yang meningkat seperti halnya

di Provinsi Bali, kondisi ini cenderung menurunkan tingkat pengangguran terdidik karena penduduk usia kerja tersebut dapat terserap dengan baik ke dalam pasar kerja.

Hasil wawancara mendalam terhadap 10 informan yang menyatakan bahwa selain variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan proporsi penduduk usia kerja terdapat alasan lain mengapa mereka tidak bekerja (menganggur) diantaranya: (1) Farah mengatakan jam kerja dan gaji yang tidak sesuai (2) Samsi mengatakan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan (3) Deco dan Kresna mengatakan orang tua cenderung menuntut mencari pekerjaan dengan gaji yang besar (4) Sigit mengatakan faktor lingkungan kerja yang kurang nyaman (5) Egar mengatakan kurangnya berorganisasi (6) Rani dan Hari mengatakan kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan (7) Yudi mengatakan persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas. Simpulan yang dapat disampaikan antara lain.

- 1) upah minimum, pertumbuhan ekonomi, investasi, proporsi penduduk usia kerja secara serempak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali.
- 2) upah minimum secara parsial mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali.

- 3) Pertumbuhan ekonomi secara parsial mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali.
- 4) Investasi secara parsial mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali.
- 5) Proporsi penduduk usia kerja secara parsial mempunyai pengaruh negatif signifikan pada tingkat pengangguran terdidik kabupaten/kota di Bali.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan simpulan diatas maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Provinsi Bali diharapkan lebih memperhatikan lagi mengenai kebijakan ekonomi makro yang berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga nantinya kebijakan yang dibuat dapat menarik para investor untuk berinvestasi. Dengan investasi yang besar tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja terdidik.
- 2) Perusahaan-perusahaan diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan untuk para tenaga kerja, dengan memberikan upah yang sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja terdidik.
- 3) Lembaga pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi diharapkan lebih meningkatkan kurikulum pendidikan, agar nantinya output yang dihasilkan dari lembaga pendidikan (tenaga kerja terdidik) memiliki ketrampilan yang sesuai kriteria yang diperlukan di pasar kerja.

- 4) Perlunya menanamkan jiwa kewirausahaan bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja terdidik karena dengan latar belakang pendidikan tinggi, tenaga kerja terdidik diharapkan mampu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam berfikir sehingga dapat mengurangi masalah pengangguran dengan menciptakan pekerjaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Rizwan and Parvez Azim. 2010. Youth Population and The Labour Market Of Pakistan: A Micro Level Study. *Pakistan Economic and Social Review*, 48 (2), pp. 183-208.
- Al-Habees, M. A., & Rumman, A. M. (2012). The Relationship between Unemployment and Economic Growth in Jordan and Some Arab Countries. *World Applied Sciences Journal*, 18 (5), pp.673-680.
- Arndt, H. W dan R. M. Sundrum. 2012. Employment, Unemployment and Under-Employment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 16 (3), pp.61-82.
- Azeng Therese F. and Thierry U. Yogo. 2015. Youth Unemployment, Education and Political Instability: Evidence from Selected Developing Countries 1991-2009. *HiCN Working Paper 200*, pp. 1- 22.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Informasi Ketenagakerjaan. Denpasar: BPS Bali.
- Bakare, AS. 2011. The Determinants of Urban Unemployment Crisis in Nigeria: An Econometric Analysis. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 2 (3), pp. 184-192.
- Cahyani, Indah Gita. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Di Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Ewubare, Dennis Brown and Ogbuagu, Anuli Regina. 2017. Unemployment Rate, Gender Inequality and Economic Growth in Nigeria “A Short-Run Impact Analysis”. *Global Journal of Human Resource Management*, 5 (5), pp.12-41.

- Keyfitz, Nathan. 2006. Putting Trained Labour Power to Work: The Dilemma of Education and Employment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 25 (3), pp. 35-55.
- Knabe, Andreas and Steffen Ratzel. 2011. Scarring or Scaring? The Psychological Impact of Past Unemployment and Future Unemployment Risk. *Economica*, 78, pp. 283-293.
- Kurniawan, A. 2014. Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis. Bandung: ALFABETA.
- Lim, Hock-Eam. 2011. The Determinants of Individual Unemployment Duration: The Case of Malaysian Graduates. *Journal of Global Management*, 2 (2), pp.184-203.
- Mahmood, Tahir *et al.* 2014. Determinants of Unemployment in Pakistan: A Statistical Study. *International Journal of Asian Social Science*. 4(12), Pp.1163-1175.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Ekonomi Makro Edisi Keempat*. Jakarta: Airlangga
- Mariska, Liana. 2016. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Tenaga Kerja Terdidik Pada Pemerintahan Kota Prabumulih. *I-Economic*, 2 (2), hal.52-59.
- Meidani, Ali A. Naji. 2011. The Dynamic Effect of Unemployment Rate on Per Capita Real GDP in Iran. *International Journal of Economics and Finance*, 3 (5), pp.170-177.
- Meteb, Alotaibi Mohamed. 2017. Unemployment and Economic Growth in Saudi Arabia 2000-2015. *International Journal of Economics and Finance*, 9 (9), pp.83-93.
- Murialti, Neng. 2016. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, Dan Tingkat Upah Terhadap Jumlah Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 6 (1), hal.19-31.
- Ningsih, Ni Made Cahya. 2015. Pengaruh Modal Dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 8 (1), hal.82-91.
- Oka Artana Yasa, I Komang dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan

- Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 (1), hal.63-71.
- Prasaja, Mukti Hadi. 2013. Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2 (3), hal.72-84.
- Putri, Rizka Ferbriana. 2015. Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik. *Economics Development Analysis Journal*, 4 (2), hal.175-181.
- Ryan, R. Achmad, Nanik Istiyani dan Anifatul Hanim. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4 (2), hal.187–191.
- Sari, Anggun Kembar. 2012. “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, hal.1-8.
- Sakiene, Henrika. 2011. Regional Unemployment Regulation during Economic Slowdown in Lithuania. *Economics and Management*, pp.309-315.
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10 (1), hal.59-71.
- Solihin, Achmad. 2014. Hubungan Upah dan Penawaran Tenaga Kerja Supir Taxi di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7 (1). Hal. 60-72.
- Suartha, Nyoman Dan I Gusti Wayan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk Dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10 (1), Hal.95-107.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal EKSOS*, 8 (3), hal.195-211.

Suryahadi, Asep, Wenefrida Widyanti, Daniel Perwira dan Sudarno Sumarto. 2010. Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39 (1), pp.29-50.

Wannakraij, Wit. 2013. The Effect of Education and Experience on Wages: The Case Study of Thailand in 2012. *Southeast Asian Journal of Economics*, 1(1), pp. 27-48.